

Pengaruh Good Governance, Sistem Pengendalian Intern Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Badarudin Kasim Tanjung Kabupaten Tabalong

Muhammad Ramadhan¹, Risa Rahmawati²

^{1,2}STIE Pancasetia, Indonesia

E-mail: mr0633760@gmail.com, risa.rahmawati@gmail.com

Article History:

Received: 14 Desember 2025

Revised: 22 Februari 2026

Accepted: 15 Maret 2026

Keywords:

Good Governance, Sistem Pengendalian Intern dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Laporan Keuangan

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menjelaskan pengaruh good governance, system pengendalian intern dan kualitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Badarudin Kasim Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan. Penelitian kuantitatif ini menentukan sampel dengan purposive sampling dengan kriteria dari level middle – upper manajemen sejumlah 31 responden. Jenis data yang digunakan adalah menggunakan data primer dengan menggunakan pengumpulan data dari kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa good governance dan system pengendalian intern berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas keuangan Pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Badarudin Kasim Tanjung Kabupaten Tabalong. Sedangkan kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Badarudin Kasim Tanjung Kabupaten Tabalong. Implikasi penelitian ini dapat mengukur aspek-aspek apa saja yang menjadi prioritas penulis dalam mengungkapkan kualitas laporan keuangan di Rumah Sakit Umum Daerah H. Badarudin Kasim Tanjung Kabupaten Tabalong.

PENDAHULUAN

Dengan adanya otonomi daerah, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada ditangan pemerintah daerah. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, diperlukan suatu penataan lingkungan dan sistem akuntansi yang baik, karena kedua hal tersebut merupakan pendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dalam rangka mengelola dana dengan sistem desentralisasi secara transparan, efisien, efektif, dan dapat dipertanggung jawabkan oleh pemerintah daerah. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi yang terdapat didalam laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai.

Pemerintah daerah adalah satuan-satuan organisasi pemerintah yang berwenang untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari sekelompok yang mendiami suatu wilayah yang dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah. Pemerintah daerah adalah organisasi dimana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Pemerintahan dalam arti luas merupakan sesuatu yang lebih besar dari pada kelompok.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2018 tentang pemerintah daerah, pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Informasi yang bermanfaat bagi para pemakai adalah informasi yang mempunyai nilai. Informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang merupakan prasyarat normatif sebagaimana disebutkan dalam Rerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2017) antara lain : Relevan, andal, dapat dibandingkan dan dipahami. Sehingga laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah harus sesuai dengan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2018 yang memutuskan tentang Badan Layanan Daerah (BLUD) antara lain:

1. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
2. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
3. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
4. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.

8. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
10. Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD pada bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
11. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
12. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
14. Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang Dewasa

Masyarakat semakin meningkat atas pemerintahan yang baik. Kinerja organisasi perangkat daerah khususnya rumah sakit harus ditingkatkan agar menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan adalah suatu cerminan untuk dapat mengetahui apakah suatu pemerintahan telah berjalan dengan baik, sehingga pemerintah diharuskan untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, laporan keuangan yang dihasilkan telah memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang disajikan oleh suatu entitas keuangan yang didalam laporan keuangannya memiliki empat karakteristik yakni relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Pemerintahan yang baik atau sering disebut *good governance*. Pemerintahan yang baik ini merupakan suatu bentuk keberhasilan dalam menjalankan tugas untuk membangun daerah sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Untuk pencapaian tujuan tersebut setiap pemerintahan daerah harus dapat mengelola sumber daya yang ada di daerahnya sendiri, salah satunya yang terpenting adalah keuangan. Namun pada kenyataannya, permasalahan didalam laporan keuangan daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap publik/masyarakat masih menyisakan permasalahan dan keraguan akan kebenarannya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan LKPD Kabupaten Tabalong khususnya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H. Badarudin Kasim Tanjung bahwa aset tetap, aset lain-lain dan belanja modal dokumen rumah sakit sudah didukung oleh bukti dokumen yang memadai untuk memperoleh keyakinan atas aset tetap dan aset lainnya. Dan BPK RI memberikan catatan terkait sistem pengendalian intern, pemilik rekening dan aset tetap yang belum dapat diyakini kewajarannya. Serapan anggaran juga belum maksimal. Ini bisa saja dikarenakan sumber daya manusia sebagai pengelola keuangan belum bekerja secara maksimal. Penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan juga tidak lepas dari masalah akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai acuan dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Selain *good governance* faktor kualitas sumber daya manusia juga mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Kegagalan sumber daya manusia pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada

kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan keuangan dengan standar dan kriteria nilai informasi laporan keuangan yang ditetapkan pemerintah.

Aspek yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah adalah sistem pengendalian intern. Sistem pengendalian intern memiliki beberapa elemen yang sangat penting dalam pengelolaan suatu akuntabilitas daerah, elemen tersebut adalah lingkungan pengendalian, resiko pengendalian, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan. Salah satu elemen sistem dasar bagi kegiatan operasional suatu entitas yang aman, sehat dan dapat berkembang secara wajar.

Sistem pengendalian intern meliputi berbagai alat manajemen yang bertujuan untuk mencapai berbagai tujuan yang luas. Tujuan tersebut yaitu menjamin kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, menjamin keandalan laporan keuangan dan data keuangan, memfasilitasi efisiensi dan efektivitas operasi-operasi pemerintah. Dengan demikian, sistem pengendalian intern merupakan fondasi *good governance* dan garis pertama pertahanan dalam melawan ketidakabsahan data dan informasi dalam penyusunan LKPD.

Faktor lainnya yang dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan yakni kualitas sumber daya manusia yakni kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan *output* dan *outcomes*. Kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. Dalam pengelolaan keuangan rumah sakit yang baik, satuan kerja ini harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, melaksanakan tugas dan fungsi serta pengalaman dibidang keuangan. Sehingga untuk menerapkan sistem akuntansi, sumber daya manusia yang berkualitas tersebut akan mampu memahami logika keuangan dengan baik.

LANDASAN TEORI

Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan atau sering disebut pembelanjaan dapat diartikan sebagai semua aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan usaha-usaha mendapatkan dana perusahaan dengan biaya yang murah serta usaha untuk menggantikan dan mengalokasikan dana tersebut secara efisien". (Sutrisno dalam Dwiyanto, 2019) Manajemen keuangan dapat didefinisikan sebagai upaya dan kegiatan dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan. Definisi lain, juga dapat diartikan sebagai upaya untuk mendapatkan dana dengan cara yang paling menguntungkan serta mengalokasikan dana secara efisien dalam perusahaan sebagai sarana untuk mencapai sarana bagi kekayaan pemegang saham. (Kamaludin dalam Dwiyanto, 2019)

Manajemen keuangan syari'ah dapat diartikan sebagai kegiatan perencanaan, pengorganisasian, staffing, pelaksanaan, dan pengendalian fungsi-fungsi keuangan yang dituntun oleh prinsip-prinsip syari'ah". (Muhammad dalam Dwiyanto, 2019). Dari definisi-definisi yang telah dipaparkan dapat diambil kesimpulan bahwa manajemen keuangan adalah salah satu fungsi manajemen terhadap segala aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan kegiatan memperoleh sumber dana, menggunakan dana dan manajemen aktiva sehingga dapat mencapai tujuan perusahaan, dengan kata lain manajemen keuangan merupakan seni dan ilmu mengelola dana perusahaan, baik itu mendapatkan dana maupun mengalokasikan dana perusahaan.

Manajer keuangan perlu menentukan tujuan yang harus dicapai. Keputusan yang benar adalah

keputusan yang akan membantu mencapai tujuan tersebut, yaitu untuk memaksimalkan nilai perusahaan karena dapat meningkatkan para pemilik perusahaan (Pemegang Saham), oleh karena itu Sutrisno (2003;5) mengemukakan bahwa tujuan dari manajemen keuangan adalah “Bagaimana perusahaan mengelola baik itu mendapatkan dana maupun mengalokasikan dana guna mencapai nilai perusahaan yaitu kemakmuran para pemegang saham”. Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Ross, Westerfield, Jordan dalam bukunya menyatakan “*The goal of financial management to maximize the current value per share of the existing stock*” Artinya bahwa “tujuan manajemen keuangan adalah memaksimalkan nilai per lembar saham dari saham yang beredar”. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan manajemen keuangan adalah mengelola dana perusahaan dengan baik, baik itu pengelolaan dalam mendapatkan dana maupun mengalokasikan dana. Selain itu manajemen keuangan juga bertujuan untuk memaksimalkan nilai perusahaan melalui peningkatan harga saham perusahaan nya.

Good Governance

Good governance sering diterjemahkan sebagai tata pemerintahan yang baik atau disebut juga dengan istilah *civil society*. *Good governance* biasa juga didefinisikan sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan yang sejalan dengan demokrasi (pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat). Setidaknya sebagian besar masyarakat membayangkan bahwa dengan memiliki praktik *good governance* yang lebih baik, maka kualitas pelayanan publik menjadi semakin baik, angka korupsi menjadi semakin rendah, dan pemerintah menjadi semakin peduli dengan kepentingan warga (dalam Dwiyanto, 2019).

Disisi lain istilah *Good governance* menurut Dwi Payana (2018:45) merupakan sesuatu yang sulit didefinisikan karena didalamnya terkandung makna etis. Dalam artian bahwa sesuatu yang dipandang baik dalam suatu masyarakat, namun bagi masyarakat lainnya belum tentu mendapat penilaian yang sama.

Menurut Dwi Payana (2018:47) dalam buku *Membangun Good governance, good governance* yaitu: “Sebagai “kepemerintahan yang baik”. Adapula yang mengartikannya sebagai “tata pemerintahan yang baik” dan ada pula yang mengartikannya sebagai “sistem pemerintahan yang baik”. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa istilah “*governance*” sebagai proses penyelenggaraan kekuasaan Negara dalam melaksanakan publik *good and services*. Sedangkan arti “*good*” dalam “*good governance*” mengandung dua pengertian, pertama, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan, berkelanjutan dan keadilan sosial; kedua, aspek-aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Good governance menurut Hasibuan (2018:45) yaitu suatu aturan kehidupan berbangsa dan bernegara dimana pola dan sikap seorang pelaku dilandasi oleh prinsip-prinsip dan karakteristik tertentu sehingga menciptakan pemerintah yang baik, pasar yang kompetitif dan *civil society* yang mandiri. Konsep *good* dalam pengertian *good governance* melibatkan dua pemahaman.

Sistem Pengendalian Intern

Undang-undang di bidang keuangan negara membawa implikasi perlunya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan. Hal ini baru dapat dicapai jika seluruh tingkat pimpinan menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di instansi

masing-masing. Dengan demikian maka penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif. Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan aset negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem ini dikenal sebagai Sistem Pengendalian Intern yang dalam penerapannya harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah tersebut.

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP Nomor 60 Tahun 2018). SPIP adalah sistem pengendalian intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (PP Nomor 60 Tahun 2018). Dengan tujuan untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam Mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance) dalam penyelenggaraan pemerintahan. (UU No. 1 Tahun 2018 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 58 ayat (1) dan (2).

Kualitas Sumber Daya Manusia

Menurut Imam Mulyana (2017:96) kualitas adalah: “Sebagai kesesuaian dengan standar diukur berbasis kadar ketidaksesuaian, serta dicapai melalui pemeriksaan”. Selanjutnya dikatakan menurut Malayu S.P Hasibuan (2017:244) dikatakan pengertian sumber daya manusia adalah: “Kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Perilaku dan sifatnya ditentukan oleh keturunan dan lingkungannya.”.

Menurut Wirawan (2015:18) menjelaskan bahwa: “Sumber daya Manusia adalah orang yang disebut sebagai manajer, pegawai, karyawan, buruh atau tenaga kerja yang bekerja untuk organisasi”. Hal senada disampaikan oleh Eddy Soeryanto Soegoto (2018:306) memberi pengertian yaitu: “Sumber Daya Manusia adalah individu-individu dalam organisasi yang memberikan sumbangan berharga pada pencapaian tujuan organisasi”.

Kemudian dipaparkan oleh M. Dawam Rahardjo (2017:18) menjelaskan pengertian Kualitas Sumber Daya Manusia yaitu: “Kualitas sumber daya manusia itu hanya ditentukan oleh aspek keterampilan atau kekuatan tenaga fisiknya saja, akan tetapi juga ditentukan oleh pendidikan atau kadar pengetahuannya pengalaman atau kematangannya dan sikapnya serta nilai-nilai yang dimilikinya”.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Sumber Daya Manusia adalah individu-individu atau yang disebut sebagai tenaga kerja, karyawan, potensi manusiawi yang bekerja untuk organisasi. Berbicara tentang masalah kualitas sumber daya manusia tentunya ada tolak ukur yang dapat kita jadikan patokan atau perbandingan agar kita bisa mengetahui dan menentukan manusia yang berkualitas. Dengan adanya batasan dan tolak ukur ini, dapat dijadikan landasan dalam menentukan kualitas pribadi seseorang.

Pengertian yang dikemukakan oleh Selo Sumarjan (2019:43) yang dikutip oleh Sudarwan Danim

(2017) bahwa kualitas sumber daya manusia Indonesia yang kita inginkan dibedah atas dasar kualitas fisik (kesehatan, kekuatan jasmani, keterampilan dan ketahanan) dan kualitas non fisik (kemandirian, ketekunan, kejujuran dan akhlak).

Dari pengertian-pengertian diatas dapat dikatakan bahwa kualitas sumber daya manusia adalah individu dalam organisasi yang memberikan sumbangan berharga pada pencapaian tujuan organisasi dengan aspek keterampilan yang ditentukan oleh tingkat pendidikan, kejujuran dan pengalaman.

Menurut Hanaffi (2017), kualitas sumber daya manusia adalah karakteristik dasar dari seseorang yang memungkinkan mereka mengeluarkan kinerja superior dalam pekerjaannya. Makna kualitas sumber daya manusia mengandung bagian kepribadian yang mendalam dan melekat pada seseorang dengan perilaku yang dapat diprediksi pada berbagai keadaan dan tugas pekerjaan.

Prediksi siapa yang berkinerja baik dan kurang baik dapat diukur dari kriteria atau standar yang digunakan. (Havesi, 2017; Nurilla, 2018) menjelaskan bahwa kualitas sumber daya manusia merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki ketrampilan, pengetahuan, dan kemampuan untuk melaksanakan suatu pekerjaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk menguji hipotesis. Penelitian kuantitatif menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik (Indriantoro, 2017). Dari jenis penelitian, penelitian ini termasuk dalam penelitian causal comparative untuk menyelidiki kemungkinan hubungan antara variabel satu dengan lainnya. Penelitian ini dilakukan untuk melihat hubungan sebab akibat antar variabel yang akan diteliti yaitu anrata variabel independen berupa good governance, sistem pengendalian intern dan kualitas sumber daya manusia dengan variabel dependen berupa kualitas laporan keuangan rumah sakit.

Populasi dan Sampel

Populasi

Populasi mengacu pada keseluruhan tujuan penelitian ini, demikian menurut Arikunto (2016:134). Populasi terdiri dari hal-hal atau individu dengan jumlah dan kualitas tertentu yang peneliti tentukan untuk dieksplorasi dan dari mana penilaian dihasilkan. Populasi penelitian ini adalah Dewan Pengawas RSUD H.Badaruddin Kasim Tanjung 2 (dua) orang, pegawai Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H. Badarudin Kasim di Manajemen yang terdiri dari Direkrtrur 1 (satu) orang, Kepala Bagian Tata Usaha 1 (satu) orang, Kepala Bidang Pelayanan 1 (satu) orang, Kepala Bidang Keperawatan 1 (satu) orang, Kepala Bidang Keuangan 1 (satu) orang, Kasubag Perencanaan dan Program 1 (satu) orang ,Kasubag Perbendaharaan dan Akuntansi 1 (satu) orang, staf Bidang Keuangan yg berjumlah 22 (dua puluh dua) orang. Sehingga total karyawan/ti RSUD H.Badaruddin Kasim Tanjung di level middle-upper manajemen berjumlah 31 orang.

Sampel

Sampel ialah sebagian anggota dari populasi yang dipilih dengan prosedur tertentu. Besarnya sampel dapat ditentukan dengan kepentingan penelitian yang akan diselenggarakan sehingga jumlah sampel yang diambil dapat mewakili dari populasi yang ada. Menurut Sugiyono (2018), sampel ialah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.

Sampel yang dipakai dalam penelitian ini didapat melalui teknik sampling jenuh yaitu keseluruhan populasi dijadikan sampel penelitian. Berdasarkan hal tersebut, maka sampel dalam penelitian ini sebanyak 31 responden.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Pengujian validitas instrument menggunakan aplikasi statistik SPSS versi 25, nilai validitas dapat dilihat pada kolom Corrected ItemTotal Correlation. Jika angka korelasi yang diperoleh lebih besar dari pada angka kritik ($r_{hitung} > r_{tabel}$) maka instrument tersebut dikatakan valid. Berdasarkan uji validitas yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan untuk mengukur masing-masing variabel penelitian dinyatakan valid. Hal ini dapat dilihat pada r_{hitung} lebih besar r_{tabel} dimana nilai r_{tabel} untuk sampel sebanyak 31 responden adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

Item Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
X1.1	0.788	0.339	Valid
X1.2	0.517	0.339	Valid
X1.3	0.614	0.339	Valid
X2.1	0.585	0.339	Valid
X2.2	0.549	0.339	Valid
X2.3	0.515	0.339	Valid
X2.4	0.405	0.339	Valid
X2.5	0.585	0.339	Valid
X2.6	0.549	0.339	Valid
X2.7	0.484	0.339	Valid
X2.8	0.420	0.339	Valid
X2.9	0.509	0.339	Valid
X3.1	0.839	0.339	Valid
X3.2	0.816	0.339	Valid
X3.3	0.806	0.339	Valid
Y.1	0.823	0.339	Valid
Y.2	0.806	0.339	Valid
Y.3	0.531	0.339	Valid
Y.4	0.855	0.339	Valid

Sumber: Data Diolah, 2023

Pada tabel di atas, hasil perhitungan setiap pertanyaan dari variabel X_1 , X_2 , X_3 , dan Y dinyatakan valid, dikarenakan nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$.

Uji Reliabilitas

Reliabilitas merupakan suatu alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan suatu indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban responden terhadap pernyataan secara konsisten atau stabil dari waktu ke waktu yaitu dengan melihat nilai Cronbach's alpha. Uji reliabilitas dilakukan untuk menunjukkan sejauh mana alat pengukur dapat dipercaya. Secara umum suatu instrument dikatakan bagus jika memiliki koefisien Cronbach's alpha $> 0,6$ maka kuesioner penelitian tersebut dinyatakan reliabel. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah untuk sampel sebanyak 31 responden adalah sebagai berikut.

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Alpha	Tingkat Koefisiensi	Keterangan
1.	Good Governance (X1)	0,735	0,60	Reliabel
2.	Sistem Pengendalian Intern (X2)	0,711	0,60	Reliabel
3.	Kualitas SDM (X3)	0,833	0,60	Reliabel
4.	Kinerja Instansi (Y)	0,798	0,60	Reliabel

Sumber: Data Diolah, 2023

Hasil uji realibilitas tersebut menunjukkan bahwa semua variabel dinyatakan realibel karena semua variabel menunjukkan *croanbach's alpha* > 0,60 sehingga untuk selanjutnya item-item pada masing-masing konsep variabel tersebut layak digunakan sebagai alat ukur.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tujuan uji normalitas merupakan untuk mengetahui apakah data penelitian yang diperoleh berdistribusi normal atau mendekati normal, karena data yang baik adalah data yang menyerupai distribusi normal. Uji distribusi normal merupakan syarat untuk semua uji statistik. Uji normalitas dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah uji Kolmogorov Smirnov. Apabila nilai *Asymp.sig (2-tiled)* > 0,05 maka data dinyatakan berdistribusi normal.

**Tabel 3. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		31
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.80174082
Most Extreme Differences	Absolute	.124
	Positive	.076
	Negative	-.124
Test Statistic		.124
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : Data Diolah, 2023

Hasil dari uji normalitas dari tabel di atas menunjukkan bahwa semua data berdistribusi secara normal, karena dapat dilihat bahwa hasil uji menunjukkan angka probabilitas 0,200 > 0,05 maka data dinyatakan berdistribusi normal. Kesimpulannya model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolinearitas

Menguji adanya kasus multikolinearitas adalah dengan patokan nilai VIF (*Variance infation factor*) dan koefisien korelasi antar variabel bebas. Untuk melihat adanya kasus multikolinearitas adalah dengan melihat VIF, apabila nilai VIF suatu model kurang dari 10 atau nilai toleransi yang besarnya di atas 0,1. Maka model tersebut dinyatakan bebas dari kasus multikolinearitas. Hasil multikolinearitas dapat ditunjukkan dalam tabel berikut:

**Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients^a**

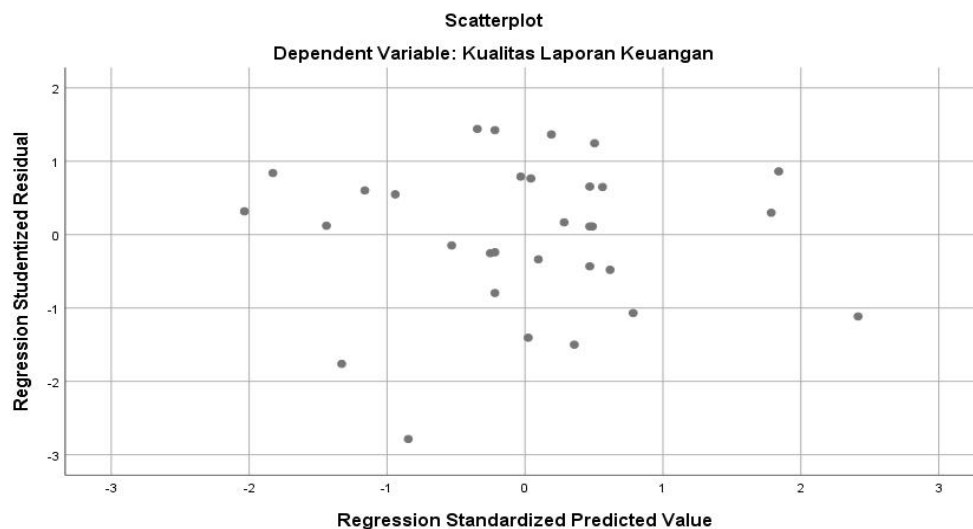
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	10.649	6.319		4.685	.004		
Good Governance	.049	.301	.031	1.862	.003	.931	1.074
Sistem Pengendalian Intern	.214	.150	.296	2.425	.001	.790	1.266
Kualitas Sumber Daya Manusia	.176	.255	.143	1.890	.006	.793	1.262

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan
Sumber : Data Diolah, 2023

Tabel diatas menunjukkan uji multikolinearitas, dapat dilihat pada tabel *coefficients* kolom *tolerance* dan VIF. Semua nilai *tolerance* dari ketiga variabel bebas > 0,10 dan VIF dari ketiga variabel bebas < dari 10 maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinieritas pada ketiga variabel bebas tersebut. Berdasarkan syarat asumsi klasik regresi linear, bahwa model regresi linier yang baik adalah yang terbebas dari adanya multikolinieritas. Dengan demikian, model di atas telah terbebas dari adanya multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji hiteroskedastisitas dapat dideteksi dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu dan grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di *studentizet*.



Sumber : Data Diolah, 2023

Mendeteksi adanya heterokedastisitas dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik regresi. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik (point-point) yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka telah terjadi heterokedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y atau sumbu vertikal, maka model regresi bersifat homogen atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Dan pada gambar 5.2 diatas terlihat bahwa data yang menyebar secara acak dan dapat disimpulkan bahwa tidak adanya terjadi heteroskedastisitas.

Berdasarkan hasil analisis, good governance, sistem pengendalian intern, dan kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan di Rumah Sakit Umum Daerah H. Badarudin Kasim Tanjung, Provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini ditunjukkan oleh uji F dengan $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan nilai signifikansi $< 0,05$, yang mengindikasikan bahwa ketiga variabel tersebut secara bersama-sama menentukan kualitas laporan keuangan. Secara parsial, good governance, sistem pengendalian intern, dan kualitas sumber daya manusia masing-masing juga berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan berdasarkan uji t.

Good governance yang mencakup transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas terbukti meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan memberikan akses informasi, melibatkan pihak terkait, serta memastikan pertanggungjawaban yang jelas. Sistem pengendalian intern, yang meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan, struktur organisasi, prosedur pencatatan, praktik kerja sehat, dan kualitas pegawai, menjadi faktor dominan dalam memengaruhi laporan keuangan, karena berfungsi sebagai mekanisme pengawasan dan perlindungan terhadap aset serta menjamin keandalan data keuangan. Sementara itu, kualitas sumber daya manusia, terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap pegawai, memastikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara efektif dan efisien sehingga mendukung penyusunan laporan keuangan yang akurat dan andal.

Dengan demikian, peningkatan kualitas laporan keuangan di RSUD H. Badarudin Kasim Tanjung sangat bergantung pada penerapan prinsip good governance, penguatan sistem pengendalian intern, serta pengembangan kualitas sumber daya manusia, yang secara keseluruhan berkontribusi terhadap transparansi, akuntabilitas, dan kinerja organisasi rumah sakit daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa good governance, sistem pengendalian intern, dan kualitas sumber daya manusia memiliki pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan di Rumah Sakit Umum Daerah H. Badarudin Kasim Tanjung, Provinsi Kalimantan Selatan. Selain pengaruh simultan, ketiga variabel tersebut juga terbukti berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan, yang menunjukkan bahwa masing-masing variabel secara individu berperan penting dalam peningkatan kualitas laporan keuangan rumah sakit. Lebih lanjut, analisis dominan menunjukkan bahwa variabel yang memiliki pengaruh paling kuat terhadap kualitas laporan keuangan adalah sistem pengendalian intern, yang berperan sebagai faktor kunci dalam menjamin keandalan, ketepatan, dan akuntabilitas informasi keuangan yang disajikan.

DAFTAR REFERENSI

- Agus Dwiyanto, Mewujudkan *Good Governance* melalui *Pelayanan Publik*, Gajah Mada Universitas Press, Yogyakarta, 2008.
- Akdon & Riduwan. (2019). *Aplikasi Statistika dan Metode Penelitian untuk Administrasi dan Manajemen*. Bandung: Dewa Ruci.
- Ariani, D, W. (2018). *Pengendalian Kualitas Statistik (Pendekatan Kuantitatif dalam Manajemen Kualitas)*. Yogyakarta: Andi.
- Ariesta, F. (2018). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan teknologi Informasi dan Pengendalian Internal Akuntansi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Pasaman Barat)*. Skripsi. Padang: Universitas Negeri Padang.
- Baridwan, Z. (2018). *Intermediate Accounting*, Edisi 8. Yogyakarta: BPFYogyakarta.
- Basuki. (2017). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Kreasi Wacana Yogyakarta.
- Chairiri, A. (2000). *Teori Akuntansi (Edisi Revisi)*. Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariat dengan program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Hanaffi, R. (2017). *Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (studi empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pati)*. Skripsi. Surakarta: IAIN Surakarta.
- Hullah, at al. (2017). *Pengaruh Sumber daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap keandalan pelaporan keuangan pada pemerintah provinsi sulawesi utara*. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing*. Vol. 3 No. 2, Desember.
- Hutapea, P dan Nurianna T. (2018). *Kompetensi Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta: Gramedia.
- Ihsanti, E. (2018). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Lima Puluh Kota)*. Artikel. Padang: Universitas Negeri Padang.
- Indriantoro, Nur & Bambang S. (2017). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Kaho, Joseph R. (2017). *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Edisi 10. Jakarta: Rajawali Pers
- Karmila, Tanjung, Amries, dan Darlis, Edvan. (2018). *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Internal terhadap Keterandalan Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Studi pada Pemerintah Riun*. *Jurnal Sorot*. Vol 9 No. 1, April.
- Mardiasmo. (2017). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Moehariono. (2017). *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Nurlaila. (2018). *Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten Enrekang)*. Skripsi. Makasar: Universitas Hasanudin.
- Prasetya, G.E. (2017). *Penyusunan dan Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Siregar, Baldrick. (2015). *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akual)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

-
- Sunyoto, D. (2017). Uji KHI kuadrat dan regresi untuk penelitian. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sutrisno. (2009), *Manajemen Keuangan Teori, Konsep dan Aplikasi*, Edisi Pertama, Cetakan Ketujuh, penerbit Ekonomi, Yogyakarta.
- Uha, I. N. (2018). Manajemen Perubahan: Teori dan Aplikasi pada Organisasi Publik dan Bisnis. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ulum, Ihyaul. (2018). Akuntansi Sektor Publik Sebuah Pengantar. Malang: UMM Press.
- Umar, H. (2018). Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.